

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 09 TAHUN 2018
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Oleh:

Selli Jumiati¹⁾, Bobby Mandala Putra²⁾, Harmiati³⁾

¹²³Program Studi Administrasi Publik FISIPOL Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia

Informasi Artikel

Tulisan dikirim

Tanggal 21-05-2025

Tulisan direvisi

Tanggal 07-06-2025

Tulisa diterima

Kembali tanggal 15-06-2025

Korespondensi penulis

Email : selli.jumiati@gmail.com

Kontak Seluler:

Abstract

Poverty alleviation is a critical priority in regional development. This study aims to evaluate the implementation of Central Bengkulu Regency Regional Regulation Number 09 of 2018 concerning Poverty Alleviation, specifically Article 15 Paragraphs (1), (2), and (3), which encompasses five strategies: reducing the burden of expenditure on the poor, increasing the capacity and income of the poor, developing and ensuring the sustainability of micro and small businesses, empowering the poor to meet basic needs, and synergizing poverty alleviation policies and programs. This study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The results indicate that despite various efforts made by the local government through social assistance programs, MSME training, and community empowerment, the implementation of the Regional Regulation has not been optimal. The main obstacles stem from budget limitations, suboptimal coordination between agencies, and minimal community participation. Therefore, ongoing evaluation and the formulation of more integrative strategies are needed to improve the effectiveness of poverty alleviation policies in Central Bengkulu Regency.

Keywords: Evaluation, Poverty, Regional Regulation, Public Policy

Abstrak

Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas penting dalam pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan, khususnya Pasal 15 Ayat (1), (2), dan (3) yang mencakup lima strategi: mengurangi beban pengeluaran warga miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui program-program bantuan sosial, pelatihan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat, implementasi Perda tersebut belum optimal. Hambatan utama berasal dari keterbatasan anggaran, koordinasi antar instansi yang belum maksimal, dan minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan perumusan strategi yang lebih integratif untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kata Kunci: Evaluasi, Kemiskinan, Peraturan Daerah, Kebijakan Publik

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang sangat kompleks, dimana kemiskinan kerap menjadi isu global maupun nasional yang menimbulkan keprihatinan banyak pihak, tidak terkecuali bagi Negara Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang (Wahyu Dewi Kesuma, 2019). Menurut (Priseptian & Primandhana, 2022) menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, tarif hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampffuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, tferciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Ferezegia, 2018).

Berdasarkan gambar di atas salah satu Provinsi termiskin di Indonesia adalah Provinsi Bengkulu. Pada Maret 2024 Bengkulu berada di urutan kesebelas Provinsi termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan mencapai 13,56 % dengan garis kemiskinan Rp671.095,00 per kapita per bulan (BPS Indonesia Tahun 2024). Pada bulan September 2024 persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Bengkulu mencapai 12,52 % (261,15 ribu jiwa) berkurang sebesar 1,04% dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 yang sebesar 13,56% (281,36 ribu jiwa) (Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2024).

Dasar hukum Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu,

dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar sertiap warga negara.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah menerbitkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin.

Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penanggulangan kemiskinan disebutkan dalam pasal 1 ayat (8) , penaggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah Daerah yang di lakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan berita dan informasi dari "bengkulutengahkab.go.id",Sekda Bengkulu Tengah menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini ada sekitar 9% dan masyarakat miskin ekstrim ada sekitar 4,6% karena pendapatan atau penghasilan dibawah Rp550.000 per bulannya. Maka dari itu pemerintah Bengkulu Tengah ingin memberikan perlindungan terhadap para pekerja yang ada di sekitar Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2022-2023 terlihat adanya kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada Tahun 2022 tingkat kemiskinan di kabupaten Bengkulu Tengah adalah 9,76 % kemudian di tahun 2023 mengalami

penurunan yaitu 9,40%. Tetapi pada tahun 2024 kemiskinan di Bengkulu Tengah mengalami kenaikan dengan tingkat kemiskinan 10,14% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah).

Penyebab meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah pertumbuhan ekonomi yang rendah, upah minimum yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, pengangguran yang tinggi, indeks pembangunan yang rendah, dan tingginya tingkat pengangguran (BPS Kabupaten Bengkulu Tengah, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi proses terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kemungkinan adanya hambatan dan kesempatan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Mohamad steven alim, 2024).

Publik dari kata *public* artinya beranekaragam dalam bahasa Indonesia, tergantung pada kata dalam kalimat yang menyertai. Publik diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, publik dan negara atau pemerintahan. Contohnya *public Opinion* artinya pendapat umum, *Public Library* artinya Perpustakaan Rakyat, *Public Health* artinya Kesehatan Masyarakat, *Public Administration* adalah Administrasi Negara, *Public Policy*, artinya Kebijakan Publik (Mohamad steven alim, 2024).

Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Zamrodah, 2016).

Secara umum evaluasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menilai proses, efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan publik (Putra, 2024). Dalam definisi yang lebih sederhana, evaluasi kebijakan berupaya untuk menjawab pertanyaan “apakah kebijakan ini berhasil dan memberikan dampak yang diinginkan?” dan bagaimana kita bisa memperbaikinya?”.

Menurut Cook dan Schioli dalam buku (Putra, 2024) evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016) penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa saja yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Hasil dan Pembahasan

1. mengurangi beban pengeluaran warga miskin

1. Program yang dijalankan

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah, Ibu Marlina Arifin Perencanaan Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menjelaskan bahwa:

“ Program yang diterapkan untuk membantu pengeluaran masyarakat miskin adalah program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, bantuan pangan melalui Program Sembako, bantuan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta program rehabilitasi rumah tidak layak huni..”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti selaku staf Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menjelaskan:

“Program yang telah diterapkan untuk membantu masyarakat miskin dalam mengurangi beban pengeluaran antara lain meliputi bantuan pangan melalui Program Sembako, bantuan langsung tunai (BLT), serta bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JKN). Selain itu, ada juga program pemenuhan kebutuhan dasar seperti bantuan disabilitas dan lanjut usia terlantar. Semua program ini bertujuan untuk meringankan beban hidup masyarakat miskin dan memastikan mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“Bahwa selama ini saya sudah menerima bantuan dari pemerintah, seperti bantuan sembako setiap bulan dan juga bantuan iuran BPJS Kesehatan, sehingga tidak perlu membayar saat berobat. Bantuan tersebut sangat membantu, apalagi

untuk kebutuhan sehari-hari dan pengobatan. saya juga merasa terbantu dengan adanya bantuan langsung tunai (BLT) saat kondisi ekonomi sedang sulit.”

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“Sampai saat ini saya belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, baik itu sembako, bantuan tunai, maupun bantuan kesehatan. Padahal, menurut saya kondisi ekonomi keluarga cukup sulit dan penghasilan tidak tetap. Saya berharap agar pemerintah lebih memperhatikan dan melakukan pendataan secara merata, agar warga yang benar-benar membutuhkan bisa turut merasakan bantuan tersebut.”

2. Siapa OPD pelaksana program mengurangi beban pengeluaran warga miskin

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“OPD yang melaksanakan program untuk mengurangi beban pengeluaran warga miskin adalah Dinas Sosial yang menangani bantuan sosial seperti Program Sembako, BLT, dan bantuan jaminan kesehatan (PBI-JKN); Dinas Kesehatan yang memastikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin; serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Selain itu, BAPPEDA juga berperan dalam perencanaan dan pengoordinasian program lintas sektor agar tepat sasaran.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menjelaskan:

“Beliau menjelaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan program pengurangan beban pengeluaran warga miskin meliputi beberapa instansi. Dinas Sosial bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan sosial seperti Program Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan jaminan kesehatan melalui PBI-JKN. Kemudian, Dinas Kesehatan berperan penting dalam memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga dilibatkan dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Tidak kalah penting, BAPPEDA memiliki peran dalam perencanaan dan koordinasi lintas sektor agar seluruh program tersebut dapat berjalan secara terpadu dan tepat sasaran”.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“Beliau menjelaskan bahwa beberapa OPD yang melaksanakan program untuk mengurangi beban pengeluaran warga miskin di antaranya adalah Dinas Sosial, yang memberikan bantuan seperti Program Sembako, BLT, dan jaminan kesehatan melalui PBI-JKN. Selain itu, Dinas Kesehatan turut membantu dengan menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Ibu Nila juga menyebutkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni. Ia menambahkan bahwa BAPPEDA

memiliki peran dalam mengoordinasikan program-program tersebut agar lebih tepat sasaran dan merata dirasakan oleh warga yang membutuhkan”.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

Beliau menjelaskan bahwa setahunya, OPD yang melaksanakan program untuk mengurangi beban pengeluaran warga miskin meliputi Dinas Sosial, yang menyalurkan bantuan seperti Program Sembako, BLT, dan jaminan kesehatan PBI-JKN. Ia juga menyebut Dinas Kesehatan yang memberikan layanan kesehatan gratis, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menangani perbaikan rumah tidak layak huni. Meskipun mengetahui adanya program-program tersebut, Ibu Susilawati mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah menerima bantuan, dan berharap agar pemerintah serta BAPPEDA sebagai koordinator perencanaan dapat lebih memperhatikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

3. Dimana program mengurangi beban pengeluaran warga miskin dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“Program pengurangan beban pengeluaran warga miskin dilaksanakan di berbagai wilayah yang telah terdata sebagai kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi. Pelaksanaan program tersebut tersebar di desa-desa dan kelurahan yang berada di bawah koordinasi

pemerintah daerah, dengan prioritas pada masyarakat miskin yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini dilaksanakan secara terpadu melalui berbagai OPD terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perumahan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menjelaskan:

“Beliau menjelaskan bahwa program pengurangan beban pengeluaran warga miskin dilaksanakan di beberapa wilayah yang telah ditetapkan sebagai daerah prioritas penanggulangan kemiskinan. Program ini menysasar desa-desa dan kelurahan dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi, terutama yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pelaksanaan program dilakukan melalui sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, yang masing-masing berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan yang diberikan mencakup dukungan di bidang pangan, layanan kesehatan gratis, bantuan pendidikan, serta akses terhadap perumahan layak huni”.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“Beliau menjelaskan bahwa program ini dilaksanakan di desa dan kelurahan yang banyak dihuni warga miskin, khususnya yang terdaftar

dalam DTKS. Bantuan berupa sembako, layanan kesehatan gratis, dan subsidi lainnya dirasakan sangat membantu, meski belum merata ke seluruh masyarakat”.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“Beliau menjelaskan bahwa program pengurangan beban pengeluaran warga miskin biasanya dilaksanakan di daerah yang warganya sudah terdaftar dalam DTKS. Namun, menurutnya, masih ada wilayah dan warga miskin seperti dirinya yang belum tersentuh program tersebut. Ia berharap program ini bisa lebih merata agar semua masyarakat miskin benar-benar merasakan manfaatnya”.

4. Kapan program mengurangi beban pengeluaran warga miskin dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“Program pengurangan beban pengeluaran warga miskin dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun, sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Program-program tersebut mulai diimplementasikan sejak awal tahun anggaran berjalan, yakni setelah penetapan APBD, dan biasanya berlangsung sepanjang tahun melalui tahapan-tahapan kegiatan oleh masing-masing OPD pelaksana. Pelaksanaan program juga disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah serta hasil musrenbang yang mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin di berbagai wilayah.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menjelaskan:

“Kalau dari yang saya tahu, program bantuan untuk warga miskin itu memang ada setiap tahun. Biasanya dimulai setelah anggaran daerah disahkan. Tapi pembagian bantuannya bisa berbeda-beda waktunya, tergantung jenis bantuannya. Ada yang dibagikan di awal tahun, ada juga yang di pertengahan atau akhir tahun. Kami sebagai warga biasanya hanya menunggu informasi dari pihak RT atau kantor desa.”

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“Setahu saya, bantuan seperti sembako dan BPJS itu biasanya diberikan tiap tahun, tapi waktunya tidak selalu sama. Kadang ada yang dibagikan awal tahun, kadang juga di pertengahan. Tapi yang jelas, program-program itu memang rutin ada setiap tahun, tergantung dari pemerintah dan kapan datanya diproses. Kami sebagai warga hanya bisa menunggu informasi dari pihak desa atau kelurahan.”

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“Selama ini saya belum pernah tahu pasti kapan bantuan itu dilaksanakan, karena saya sendiri belum pernah mendapatkannya. Biasanya saya hanya dengar dari tetangga atau orang desa kalau ada pembagian bantuan, tapi tidak semua warga mendapat informasi yang sama. Harapan saya ke depan,

jadwal dan informasi program bantuan bisa lebih terbuka dan merata supaya kami yang belum pernah menerima juga bisa ikut merasakan.”

5. Mengapa program mengurangi beban pengeluaran warga miskin sangat penting

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“Program pengurangan beban pengeluaran warga miskin sangat penting karena merupakan bagian dari upaya perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan tanpa terbebani oleh biaya yang besar. Selain itu, program ini juga menjadi strategi jangka pendek untuk mengurangi tekanan ekonomi pada keluarga miskin sambil mendorong pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup mereka. Menurut beliau, tanpa adanya intervensi ini, kelompok masyarakat rentan akan semakin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menjelaskan:

“Program pengurangan beban pengeluaran warga miskin sangat penting karena bisa langsung membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan, berobat, dan menyekolahkan anak. Menurutnya, tanpa bantuan tersebut, banyak keluarga miskin yang akan semakin kesulitan secara ekonomi dan tidak bisa hidup layak.”

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“Program pengurangan beban pengeluaran sangat penting karena sangat membantu kehidupan sehari-hari. Dengan adanya bantuan sembako dan BPJS kesehatan, pengeluaran jadi berkurang, terutama untuk kebutuhan makan dan biaya berobat. Menurut beliau, tanpa bantuan itu, akan sangat sulit mencukupi kebutuhan keluarga, apalagi penghasilan tidak menentu.”

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“Beliau menyampaikan bahwa program pengurangan beban pengeluaran sangat penting karena banyak warga yang benar-benar membutuhkan. Saya merasa bahwa bantuan seperti sembako atau BPJS sangat membantu, tapi dirinya belum pernah mendapatkan. Menurut saya, pemerintah seharusnya lebih adil dalam pendataan agar bantuan bisa dirasakan oleh semua warga miskin yang memang membutuhkan.”

6. Bagaimana cara mengurangi beban pengeluaran warga miskin

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“Cara mengurangi beban pengeluaran warga miskin dilakukan melalui berbagai bantuan seperti sembako, bantuan BPJS kesehatan, bantuan pendidikan, dan perbaikan rumah tidak layak huni. Program ini dilaksanakan dengan kerja sama antar OPD dan menggunakan data

DTKS supaya bantuan tepat sasaran.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menjelaskan:

“ Beliau menjelaskan bahwa cara mengurangi beban pengeluaran warga miskin dilakukan melalui berbagai program bantuan, seperti bantuan sembako, bantuan langsung tunai (BLT), bantuan iuran BPJS untuk layanan kesehatan, serta bantuan untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas. Semua bantuan ini ditujukan agar masyarakat miskin bisa memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus mengeluarkan biaya besar.”

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“Menurut saya, bantuan seperti sembako, BPJS gratis, dan bantuan sekolah anak sangat membantu kami masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya bantuan itu, pengeluaran kami jadi lebih ringan, apalagi untuk biaya kesehatan dan pendidikan yang cukup besar. Bantuan seperti ini sangat kami harapkan terus berlanjut.”

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“Saya pribadi belum pernah menerima bantuan apa pun, baik itu sembako, BPJS gratis, maupun bantuan pendidikan. Padahal saya merasa kondisi ekonomi keluarga

saya juga sulit. Mungkin karena tidak masuk dalam data atau belum terdaftar di DTKS. Saya berharap ke depan pendataan bisa lebih merata supaya bantuan bisa dirasakan oleh semua yang benar-benar membutuhkan.”

2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin

a. Apa saja program kegiatan pelatihan keterampilan atau bantuan modal yang diberikan kepada masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah, Ibu Marlina Arifin Perencanaan Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terkait apa saja program atau kegiatan pelatihan keterampilan atau bantuan modal yang diberikan kepada masyarakat miskin, Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“Program pelatihan keterampilan dan pendapatan warga miskin adalah program penempatan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, program perikanan tangkap, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyuluh pertanian, dan program pengelolaan sistem data gender dan anak”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti selaku staf Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menjelaskan:

“Upaya meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin dilakukan

melalui berbagai program pemberdayaan sosial yang bersifat praktis dan berkelanjutan. Program-program tersebut meliputi pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan, seperti perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas, serta pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP) untuk mendukung pengembangan usaha kecil yang dijalankan oleh masyarakat miskin. Dinas Sosial juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga masyarakat dan pemerintah desa, untuk memastikan pelaksanaan program tepat sasaran dan sesuai kebutuhan lokal”.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“ Beliau menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah sangat membantu, terutama dalam bentuk pelatihan keterampilan dan bantuan usaha kecil. Menurutnya, pelatihan yang diterima bisa digunakan untuk membuka usaha rumahan, sehingga ada tambahan penghasilan. Saya juga merasa terbantu dengan adanya pendampingan dari pemerintah yang memberikan arahan dan motivasi agar bisa mandiri secara ekonomi. Bantuan seperti ini dirasa sangat bermanfaat bagi keluarga kurang mampu untuk memperbaiki kehidupan”.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“ Beliau menyampaikan bahwa selama ini belum pernah menerima bantuan dalam bentuk pelatihan keterampilan maupun bantuan modal dari pemerintah. Menurut saya, informasi

mengenai program-program tersebut juga belum banyak diketahui oleh masyarakat di sekitarnya. Saya berharap ke depan bantuan tersebut bisa lebih merata dan mudah diakses oleh warga yang benar-benar membutuhkan”.

- b. Siapa OPD pelaksana program yang meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“Beliau menjelaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pelaksana program peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menjelaskan:

“Menurut saya, pelaksanaan program peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin melibatkan beberapa dinas. Di antaranya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memberikan pelatihan keterampilan kerja, Dinas Pertanian yang membantu petani kecil, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang aktif membina kelompok usaha masyarakat di desa.”

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“Setahu saya, program-program untuk membantu masyarakat miskin

dijalankan oleh beberapa dinas, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sering mengadakan pelatihan dan pemberdayaan kelompok, kemudian ada juga Dinas Pertanian yang membantu kami dalam hal bibit dan alat pertanian, serta Dinas Ketahanan Pangan yang mendukung dalam hal kebutuhan pangan keluarga.”

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“Kalau dari pengalaman saya pribadi, saya belum pernah menerima bantuan atau program pelatihan apapun. Tapi saya pernah dengar dari tetangga bahwa ada program dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, juga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Katanya mereka sering bantu lewat pelatihan atau bantuan usaha, tapi saya sendiri belum pernah dilibatkan.”

- c. Dimana program yang meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“ Beliau menjelaskan bahwa program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin dilaksanakan di berbagai wilayah desa dan kelurahan yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Tengah. Lokasi pelaksanaan program disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah, seperti desa dengan sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro. Program ini

menyasar langsung masyarakat miskin di tingkat lokal agar dampaknya lebih merata dan tepat sasaran”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menjelaskan:

“Program-program yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin dilaksanakan di berbagai desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Lokasi pelaksanaan disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing, seperti pertanian di desa, usaha mikro, maupun kegiatan lain yang mendukung ekonomi lokal. Dengan cara ini, bantuan dan pelatihan bisa lebih tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.”

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“Program-program untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin memang dilakukan di berbagai desa dan kelurahan di Bengkulu Tengah. Biasanya disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing, seperti di desa kami yang fokus pada pertanian dan usaha kecil. Program ini cukup membantu karena langsung menyentuh kebutuhan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan dan pelatihan.”

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“Program-program untuk meningkatkan kemampuan dan

pendapatan warga miskin memang ada di beberapa desa dan kelurahan, tapi saya pribadi belum pernah menerima bantuan tersebut. Mungkin karena belum merata atau belum sampai ke wilayah tempat saya tinggal. Padahal, menurut saya, program seperti itu sangat dibutuhkan oleh warga seperti kami yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

- d. Kapan program yang meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“ Beliau menjelaskan bahwa program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan perencanaan tahunan pemerintah daerah. Program tersebut biasanya dimulai sejak awal tahun anggaran dan berjalan secara bertahap, tergantung pada ketersediaan dana dan kesiapan masing-masing OPD pelaksana. Pelaksanaan program juga mengikuti hasil musrenbang dan prioritas pembangunan daerah”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menjelaskan:

“Program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin biasanya mulai dilaksanakan sejak awal tahun anggaran. Pelaksanaannya mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dalam perencanaan tahunan, termasuk hasil

musrenbang dan prioritas pembangunan daerah. Namun, realisasi di lapangan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran, kesiapan teknis, serta koordinasi antar OPD terkait.”

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“Setahu saya, program-program bantuan untuk warga miskin biasanya mulai berjalan di awal tahun, tapi kadang juga baru terlihat kegiatannya beberapa bulan setelahnya. Misalnya seperti pelatihan atau bantuan usaha kecil, itu mulai ada sekitar pertengahan tahun. Tapi kami di masyarakat kadang tidak tahu pasti kapan mulainya, karena informasinya tidak selalu langsung sampai.”

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“Kalau soal program peningkatan pendapatan itu, saya dengar memang ada setiap tahun, tapi saya pribadi belum pernah dapat bantuannya. Biasanya orang-orang bilang programnya mulai jalan di awal tahun, tapi tidak semua warga tahu kapan tepatnya. Kadang kami baru dengar setelah programnya sudah berjalan atau selesai, jadi sulit ikut serta kalau tidak ada informasi dari awal.”

e. Mengapa program yang meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin sangat penting.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“ Beliau menyampaikan bahwa program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin sangat penting karena dapat membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan. Menurutnya, bantuan yang hanya bersifat sementara tidak cukup jika tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan keterampilan, pemberdayaan usaha, dan akses pada sumber daya produktif, warga miskin diharapkan mampu menciptakan penghasilan sendiri dan meningkatkan taraf hidup mereka dalam jangka panjang”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menjelaskan:

“ Beliau menjelaskan bahwa program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin sangat penting karena dapat memberikan solusi jangka panjang dalam menanggulangi kemiskinan. Menurutnya, bantuan sosial saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan upaya pemberdayaan yang membuat masyarakat bisa mandiri secara ekonomi. Melalui pelatihan, pembinaan, dan dukungan usaha, masyarakat miskin dapat memiliki keterampilan dan peluang usaha sendiri, sehingga tidak terus-menerus bergantung pada bantuan pemerintah”.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“ Beliau menjelaskan bahwa program yang meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin sangat penting karena dapat membantu

masyarakat untuk mandiri dan tidak terus-menerus bergantung pada bantuan. Menurutnya, banyak warga yang sebenarnya memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja, tetapi terkendala oleh kurangnya keterampilan dan modal. Dengan adanya program pelatihan dan pemberdayaan, masyarakat miskin bisa memiliki peluang usaha sendiri dan meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“ Beliau menjelaskan bahwa program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin sangat penting karena dapat membantu masyarakat untuk keluar dari kondisi kemiskinan secara mandiri. Menurutnya, banyak warga yang memiliki keinginan untuk bekerja dan berusaha, namun terkendala oleh keterbatasan keterampilan dan modal. Jika masyarakat diberikan pelatihan dan dukungan usaha, mereka akan memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan sendiri tanpa harus selalu bergantung pada bantuan pemerintah. Ia juga berharap program seperti ini bisa menjangkau lebih banyak warga yang benar-benar membutuhkan”.

f. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“ Beliau menjelaskan bahwa cara untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin dilakukan

melalui berbagai program pemberdayaan. Di antaranya adalah pelatihan keterampilan kerja, dukungan terhadap usaha mikro dan kecil, serta pemberian akses terhadap modal usaha dan sarana produksi. Menurut beliau, program-program tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi dan mampu menciptakan pendapatan sendiri, sehingga tidak terus-menerus bergantung pada bantuan sosial”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menjelaskan:

“ Beliau menjelaskan bahwa cara meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin dilakukan melalui program pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta pemberian bantuan stimulan seperti peralatan kerja atau modal usaha kecil. Program ini ditujukan agar masyarakat miskin bisa memiliki kemampuan untuk bekerja atau berwirausaha sendiri, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial”.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“Menurut saya, untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin, diperlukan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti menjahit, membuat kue, atau bertani. Selain itu, bantuan modal usaha juga sangat dibutuhkan agar kami bisa memulai usaha kecil. Kalau ada dukungan seperti itu, kami bisa lebih mandiri dan tidak selalu

mengandalkan bantuan dari pemerintah.”

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“Selama ini saya belum pernah menerima bantuan atau pelatihan apapun. Padahal saya ingin sekali ikut pelatihan keterampilan seperti memasak atau menjahit agar bisa menambah penghasilan. Saya yakin, kalau warga miskin diberi kesempatan dan dukungan, kami bisa berusaha sendiri tanpa bergantung terus pada bantuan. Tapi kenyataannya, banyak dari kami yang tidak tahu ke mana harus mengajukan atau tidak tahu informasi soal program yang ada.”

3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil

a. Apa program yang telah dilakukan untuk mendukung UMKM usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah, Ibu Marlina Arifin Perencanaan Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“ Beliau menyampaikan bahwa berbagai program telah dilakukan untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil (UMKM). Di antaranya adalah fasilitasi pelatihan manajemen usaha, pelatihan pemasaran digital, pemberian bantuan peralatan usaha, serta penyediaan akses terhadap permodalan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan. Selain itu, dilakukan juga pendampingan

berkelanjutan agar pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing usahanya. Menurut beliau, dukungan ini diberikan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan melalui penguatan sektor UMKM”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti selaku staf Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menjelaskan:

“ Ibu Rini menjelaskan bahwa Dinas Sosial telah menjalankan beberapa program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal, pemberian bantuan peralatan usaha bagi pelaku UMKM, serta fasilitasi akses permodalan melalui program bantuan sosial produktif. Selain itu, terdapat juga kegiatan pendampingan usaha secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan usaha masyarakat miskin yang tergolong dalam pelaku UMKM. Program-program ini dirancang untuk membantu masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan dan mandiri secara ekonomi melalui pengembangan usaha kecil yang mereka kelola”.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“ Dalam wawancara tersebut, Ibu Nila menyampaikan bahwa dirinya mengetahui adanya beberapa program pemerintah yang mendukung pelaku usaha mikro dan kecil, seperti pelatihan keterampilan usaha, bantuan alat produksi, serta adanya

pendampingan dari dinas terkait. Ia juga mengungkapkan bahwa program-program tersebut sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha, terutama bagi mereka yang baru merintis. Menurutnya, dukungan pemerintah ini dapat menjadi peluang bagi warga untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga secara mandiri”.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“ Ibu Susilawati menyampaikan bahwa dirinya mengetahui adanya beberapa program pemerintah seperti pelatihan usaha, bantuan alat produksi, dan pemberian modal usaha yang ditujukan untuk mendukung pelaku UMKM. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa belum semua masyarakat merasakan manfaat dari program tersebut, termasuk dirinya. Meskipun demikian, ia menilai bahwa program-program tersebut sangat baik dan dibutuhkan, terutama bagi masyarakat kecil yang ingin mengembangkan usaha, dan berharap agar ke depan pelaksanaan dan distribusi program dapat lebih merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan”.

b. Siapa OPD pelaksana program yang mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pelaksana program dalam mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro

dan kecil di daerah ini melibatkan beberapa instansi terkait. Di antaranya adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai OPD utama yang menangani program pembinaan dan penguatan kapasitas usaha, serta Dinas Sosial dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui usaha produktif. Selain itu, BAPPEDA sendiri berperan dalam perencanaan dan sinkronisasi program antar-OPD agar pelaksanaan berjalan secara terpadu dan tepat sasaran. Menurut beliau, kolaborasi antar-instansi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan UMKM sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi masyarakat”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menjelaskan:

“Bahwa Dinas Sosial turut berperan dalam program pengembangan dan keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat menjalankan usaha produktif. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan OPD lain seperti Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, serta BAPPEDA, guna memastikan pelaksanaan program berjalan terpadu dan menyentuh kelompok sasaran”.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“ Setahu saya, program pengembangan dan keberlanjutan usaha mikro dan kecil di daerah ini dijalankan oleh beberapa dinas pemerintah. Yang paling sering saya dengar dan lihat turun langsung ke lapangan adalah Dinas Koperasi,

UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Mereka memberikan pelatihan dan bantuan alat usaha. Selain itu, ada juga Dinas Sosial yang mendampingi warga miskin untuk usaha mandiri. Saya juga pernah dengar BAPPEDA ikut menyusun program agar semua kegiatan antar dinas bisa saling mendukung. Menurut saya, kalau dinas-dinas ini bekerja sama terus, usaha kecil di desa bisa makin maju.”

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“Sepengetahuan saya, program pengembangan usaha mikro memang ada dan dijalankan oleh beberapa dinas seperti Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Namun, saya pribadi belum pernah mendapatkan bantuan atau pendampingan dari program tersebut. Saya juga pernah dengar Dinas Sosial dan BAPPEDA terlibat dalam program seperti ini, tapi belum semua masyarakat merasakan dampaknya. Menurut saya, program ini bagus, tapi perlu lebih merata agar semua pelaku usaha kecil bisa ikut berkembang.”

c. Dimana program yang mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“Bahwa program yang mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil dilaksanakan di berbagai wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Program-program tersebut menasar langsung masyarakat di tingkat desa dan

kelurahan, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki potensi usaha mikro dan kecil berbasis sumber daya lokal. Menurut beliau, pelaksanaan program dilakukan secara terdesentralisasi melalui kerja sama dengan pemerintah kecamatan, perangkat desa, serta pendamping lokal, agar intervensi yang diberikan dapat tepat sasaran dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi ekonomi masyarakat setempat. Hal ini bertujuan agar UMKM yang tumbuh di daerah dapat berkembang secara berkelanjutan dan mendorong peningkatan ekonomi lokal”.

d. Kapan program yang mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“ Bahwa program yang mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil telah dijalankan secara berkelanjutan sejak beberapa tahun terakhir, khususnya pasca pandemi COVID-19. Menurut beliau, program ini mulai diintensifkan sekitar tahun 2021 sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan setiap tahun dan disesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah melalui mekanisme Musrenbang, serta dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Program ini terus berlanjut hingga saat ini dan menjadi salah satu prioritas dalam agenda pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menyampaikan:

"Bahwa program yang mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro mulai dijalankan sejak tahun 2021, sebagai respons atas dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor usaha kecil. Beliau menjelaskan bahwa program ini dijalankan secara berkelanjutan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah daerah dalam pemulihan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaannya disesuaikan dengan hasil Musrenbang dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta terus berlangsung hingga saat ini demi mendukung kemandirian pelaku usaha mikro di Kabupaten Bengkulu Tengah."

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

"Program pengembangan dan keberlanjutan usaha mikro mulai dijalankan sejak 2021 pasca pandemi. Menurut beliau, program ini rutin dilaksanakan tiap tahun dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam mempertahankan usaha dan menambah penghasilan."

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

"Menurut beliau, program pengembangan dan keberlanjutan usaha mikro mulai berjalan sejak tahun 2021. Namun, ia belum pernah menerima bantuan atau pendampingan dari program tersebut. Meskipun demikian, ia mengetahui

bahwa program ini terus dilaksanakan setiap tahun dan membantu banyak pelaku usaha di sekitarnya."

e. Mengapa program yang mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil sangat penting.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

"Alasan utama dilaksanakannya program yang mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil adalah karena sektor UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Menurut beliau, banyak masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah yang menggantungkan penghidupan dari usaha kecil, sehingga perlu didorong melalui program pembinaan, akses permodalan, dan peningkatan kapasitas agar usahanya bisa bertahan dan berkembang. Program ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan keluarga, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. Oleh karena itu, pengembangan UMKM dipandang sebagai solusi jangka panjang yang berkelanjutan dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat"

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti pada tanggal 17 Juni 2025

"Bahwa program ini sangat penting karena bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan. Menurutnya, melalui pengembangan UMKM, masyarakat tidak hanya diberikan bantuan sementara, tetapi juga dibekali

dengan keterampilan, peralatan, serta akses usaha yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Program ini juga diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan secara bertahap, karena dengan usaha yang terus berkembang, masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja sendiri maupun bagi orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, penguatan usaha mikro dan kecil menjadi salah satu strategi jangka panjang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu”.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“ Ibu Nila menjelaskan bahwa program untuk mengembangkan UMKM sangat penting, terutama bagi pelaku usaha kecil yang ingin menambah penghasilan keluarga. Banyak warga ingin berusaha tapi terkendala modal, pengetahuan, dan akses pasar. Menurutnya, pelatihan, bantuan alat, dan pendampingan sangat membantu masyarakat agar bisa mandiri dan tidak bergantung pada bantuan. Program ini memberi harapan bagi keluarga untuk keluar dari kemiskinan lewat usaha yang berkelanjutan”.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“ Ibu Susilawati menjelaskan bahwa program untuk mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMKM sangat penting, terutama bagi masyarakat yang ingin berusaha tapi terkendala modal dan fasilitas. Meski belum pernah mendapat bantuan, ia mengakui program seperti pelatihan,

bantuan alat, dan akses modal sangat dibutuhkan agar warga bisa mandiri. Ia berharap ke depan lebih banyak masyarakat, termasuk yang belum tersentuh bantuan, bisa merasakan manfaatnya, karena program ini memberi harapan untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan”.

- f. Bagaimana cara mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“ Beliau menyampaikan bahwa cara untuk mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain adalah pemberian pelatihan keterampilan dan manajemen usaha, fasilitasi akses permodalan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan, serta bantuan sarana produksi bagi pelaku usaha. Selain itu, dilakukan juga pendampingan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa usaha yang dirintis masyarakat dapat bertahan dan berkembang. Menurut beliau, penguatan jaringan pemasaran dan digitalisasi UMKM juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan ekosistem usaha yang mendukung keberlanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“ Pengembangan dan keberlanjutan UMKM dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan yang bersifat jangka panjang. Di antaranya adalah

pelatihan keterampilan usaha, pendampingan intensif kepada pelaku usaha, serta pemberian bantuan alat dan modal usaha produktif. Ia juga menekankan pentingnya penguatan jejaring usaha dan pemasaran, agar produk UMKM memiliki daya saing di pasar lokal maupun lebih luas. Menurut beliau, dengan kombinasi antara pelatihan, pendampingan, dan dukungan sarana, masyarakat miskin yang memiliki usaha kecil dapat berkembang secara mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan ekonomi keluarga yang lebih stabil dan berkelanjutan”.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“Beliau menjelaskan bahwa usaha mikro dan kecil dapat berkembang jika pelaku usaha mendapatkan pelatihan yang sesuai, terutama dalam mengelola keuangan dan memasarkan produk. Menurutnya, bantuan modal dan alat usaha juga sangat membantu. Selain itu, dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan kemudahan akses ke pasar digital dinilai penting untuk menjaga agar usaha tetap berjalan dan bisa berkembang lebih baik ke depannya”.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“Beliau menjelaskan bahwa usaha mikro dan kecil akan lebih berkembang jika ada dukungan nyata dari pemerintah, seperti bantuan modal, pelatihan usaha, serta pendampingan. Ia mengaku belum

pernah menerima bantuan tersebut, sehingga perkembangan usahanya berjalan lambat dan terbatas. Menurutnya, akses terhadap pelatihan dan pasar sangat dibutuhkan agar usaha kecil bisa bertahan dan berkembang secara mandiri”.

4. pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar

- a. Apa program pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah, Ibu Marlina Arifin Perencanaan Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terkait apa program pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar, Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“Beliau menyampaikan bahwa program pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar dilakukan melalui bantuan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, serta penyediaan air bersih dan perbaikan rumah. Selain itu, diberikan juga pelatihan keterampilan dan pembinaan usaha untuk mendorong kemandirian. Seluruh program ini ditujukan agar warga tidak hanya terpenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi juga mampu meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti selaku staf Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin Dinas Sosial.

“ Beliau menjelaskan bahwa program yang dilaksanakan mencakup bantuan pangan melalui Program Sembako, bantuan layanan kesehatan dan pendidikan, serta perbaikan rumah tidak layak huni. Selain itu, diberikan pula pelatihan keterampilan dasar dan

dukungan usaha ekonomi produktif agar warga miskin dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan berkelanjutan”.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“ Beliau menyampaikan bahwa bantuan yang diterima meliputi sembako, layanan kesehatan gratis, serta bantuan pendidikan bagi anak-anak. Selain itu, dirinya juga pernah mendapatkan pelatihan keterampilan dari pemerintah desa untuk mendukung usaha rumahan. Menurutnya, program-program tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan harapan untuk kehidupan yang lebih baik”

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“ Beliau menjelaskan bahwa meskipun dirinya belum pernah menerima bantuan secara langsung, ia mengetahui adanya beberapa program pemberdayaan bagi warga miskin, seperti bantuan sembako, layanan berobat gratis, bantuan pendidikan, serta pelatihan keterampilan dari pemerintah desa. Menurutnya, program-program tersebut sangat membantu warga yang kurang mampu, namun ia berharap agar bantuan bisa lebih merata dan menjangkau semua warga yang benar-benar membutuhkan”.

b. Siapa OPD pelaksana program pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“Beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Di antaranya adalah Dinas Sosial yang berperan dalam pemberian bantuan sosial, pelatihan, dan layanan dasar; Dinas Kesehatan untuk layanan kesehatan gratis; Dinas Pendidikan dalam mendukung akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu; serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menangani perbaikan rumah tidak layak huni. Menurut beliau, koordinasi antar OPD ini penting agar program berjalan terarah dan tepat sasaran”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“Menjelaskan bahwa pelaksanaan program melibatkan beberapa OPD, seperti Dinas Sosial untuk bantuan dan pelatihan, Dinas Kesehatan untuk layanan gratis, Dinas Pendidikan untuk akses sekolah, serta Dinas Perumahan untuk perbaikan rumah. Koordinasi antar OPD sangat penting agar program tepat sasaran.”

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“Setahu saya, program ini dijalankan oleh beberapa dinas, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perumahan. Masing-masing punya peran, misalnya

bantuan, pengobatan gratis, sekolah, dan perbaikan rumah. Tapi saya harap koordinasinya bisa lebih baik lagi.”

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“Saya tahu program ini dijalankan oleh beberapa dinas seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Tapi saya pribadi belum pernah menerima bantuan. Mungkin karena kurangnya pendataan atau koordinasi antar dinas.”

c. Dimana program pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“ Beliau menyampaikan bahwa program pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar dilaksanakan di berbagai wilayah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pelaksanaan program difokuskan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Menurut beliau, lokasi pelaksanaan ditentukan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial agar program benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“Program pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar dilaksanakan di beberapa titik strategis yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah,

khususnya di desa dan kelurahan yang masuk dalam kategori rawan kemiskinan. Menurut beliau, pemilihan lokasi pelaksanaan program didasarkan pada hasil pendataan dan pemetaan wilayah melalui kerja sama dengan pihak pemerintah daerah dan instansi terkait, agar program dapat lebih tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.”

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“Program pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar dilaksanakan di beberapa wilayah desa dan kelurahan, terutama yang kondisi ekonominya masih tertinggal. Beliau menyampaikan bahwa di daerah tempat tinggalnya, program tersebut telah menasar warga kurang mampu, meskipun belum merata ke seluruh wilayah. Menurutnya, program ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan.”

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“Program pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar memang telah dilaksanakan di beberapa wilayah desa dan kelurahan, namun belum merata. Beliau menyampaikan bahwa di daerah tempat tinggalnya, masih ada warga yang tergolong miskin namun belum tersentuh bantuan. Menurutnya, kurangnya pemerataan dan akurasi data menjadi penyebab beberapa

masyarakat yang membutuhkan belum mendapatkan program tersebut.”

- d. Kapan program pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“ Beliau menyampaikan bahwa program pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar telah dijalankan secara bertahap sejak beberapa tahun terakhir dan terus berlangsung hingga sekarang. Program ini dilaksanakan setiap tahun melalui perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan anggaran yang tersedia. Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program umumnya dimulai setelah proses perencanaan dan penganggaran daerah selesai, yakni pada awal tahun anggaran berjalan”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“Program pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar telah dilaksanakan secara bertahap sejak beberapa tahun terakhir dan masih terus berlanjut hingga saat ini. Setiap tahun, program ini dirancang berdasarkan hasil musyawarah dan kebutuhan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan anggaran daerah. Umumnya, pelaksanaan dimulai pada awal tahun anggaran setelah seluruh proses perencanaan dan penganggaran selesai dilakukan.”

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat

Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“Setahu saya, program pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu dan masih terus dilaksanakan sampai sekarang. Biasanya program-program tersebut mulai terlihat kegiatannya di awal tahun, setelah pemerintah daerah selesai menyusun anggaran. Programnya beragam, tergantung kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.”

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“Saya mengetahui bahwa program pemberdayaan untuk warga miskin memang sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu dan dilaksanakan setiap tahun. Namun, saya pribadi belum pernah menerima bantuan dari program tersebut. Biasanya program dimulai setelah tahun anggaran baru berjalan, tapi tidak semua warga yang membutuhkan mendapatkan bantuan, mungkin karena keterbatasan kuota atau belum terdata dengan baik.”

- e. Mengapa program pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar sangat penting

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“ Beliau menyampaikan bahwa program pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurutnya, jika kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, pendidikan, dan tempat

tinggal tidak terpenuhi, maka masyarakat akan semakin sulit keluar dari kemiskinan. Program ini dianggap sebagai langkah awal agar warga bisa hidup lebih layak dan pelan-pelan menjadi mandiri”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“ Beliau menjelaskan bahwa program ini sangat penting karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat seperti makanan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Tanpa pemenuhan kebutuhan dasar, warga miskin akan kesulitan menjalani hidup yang layak. Menurutnya, lewat program ini, pemerintah tidak hanya membantu secara langsung, tetapi juga mendorong agar warga bisa lebih mandiri dan perlahan keluar dari kemiskinan”.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“ Bahwa program tersebut sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makan, berobat, dan menyekolahkan anak. Menurutnya, tanpa bantuan seperti itu, banyak warga miskin yang akan semakin sulit hidupnya. Ia juga berharap program ini terus berjalan dan bisa dirasakan secara merata oleh semua yang membutuhkan”.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“ Beliau menjelaskan bahwa program untuk membantu warga miskin memenuhi kebutuhan dasar sangat

penting karena banyak masyarakat yang masih kesulitan dalam hal makan, biaya berobat, dan pendidikan anak. Menurutnya, program seperti ini bisa menjadi harapan bagi warga kurang mampu agar bisa hidup lebih layak. Ia juga berharap agar bantuan tersebut bisa lebih merata dan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan”.

- f. Bagaimana cara pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“ Beliau menyampaikan bahwa cara pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar dilakukan melalui berbagai program yang terarah dan berkelanjutan. Beberapa di antaranya adalah pemberian bantuan pangan, akses layanan kesehatan, bantuan pendidikan, serta perbaikan rumah tidak layak huni. Selain itu, dilakukan juga pelatihan keterampilan dan dukungan usaha kecil agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi. Menurut beliau, pemberdayaan ini penting agar warga miskin tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu meningkatkan taraf hidupnya sendiri secara perlahan”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“Beliau menjelaskan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui beberapa langkah, seperti pemberian bantuan pangan, bantuan kesehatan, dan bantuan pendidikan bagi keluarga miskin. Selain itu, warga juga diberi pelatihan keterampilan dan dukungan usaha kecil agar bisa mandiri.

Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya membantu secara langsung, tetapi juga mendorong masyarakat untuk bisa keluar dari kemiskinan secara perlahan”.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“Beliau menjelaskan bahwa pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar sangat membantu melalui bantuan sembako, akses berobat gratis, dan bantuan pendidikan anak. Ia juga menilai pelatihan keterampilan sangat penting agar warga bisa memiliki penghasilan sendiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah”.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“Beliau menjelaskan bahwa hingga saat ini belum pernah menerima bantuan apapun, baik berupa sembako, bantuan pendidikan, maupun akses layanan kesehatan gratis. Menurutnya, pemberdayaan warga miskin seharusnya dilakukan secara merata dan tepat sasaran agar semua yang membutuhkan dapat terbantu dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupan”.

5. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

- a. Apa saja program yang mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah,

Ibu Marlina Arifin Perencanaan Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“ Beberapa program yang dijalankan secara sinergis antara lain adalah Program Sembako, bantuan sosial tunai, bantuan pendidikan dan kesehatan, serta pelatihan keterampilan dan penguatan usaha mikro. Beliau menjelaskan bahwa sinergi ini dilakukan melalui koordinasi antara BAPPEDA dengan OPD teknis seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Koperasi dan UMKM. Tujuannya agar seluruh program saling melengkapi dan tidak berjalan sendiri-sendiri, sehingga penanggulangan kemiskinan bisa lebih efektif, terarah, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti selaku staf Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin Dinas Sosial.

“ Beliau menjelaskan bahwa sinergi dilakukan melalui kolaborasi antar OPD dalam menjalankan berbagai program, seperti Program Sembako, bantuan sosial tunai, bantuan pendidikan dan kesehatan, serta program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi. Menurutnya, Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Koperasi dan UMKM untuk memastikan agar setiap program saling mendukung dan tepat sasaran. Tujuannya adalah agar kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dan memberi dampak nyata bagi masyarakat miskin”.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten

Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau menjelaskan:

“ Beliau menjelaskan bahwa dirinya mengetahui adanya beberapa program yang saling mendukung dalam upaya penanggulangan kemiskinan, seperti bantuan sembako, layanan berobat gratis, bantuan pendidikan, dan pelatihan keterampilan dari pemerintah desa. Menurutnya, program-program tersebut saling berkaitan dan membantu masyarakat dari berbagai sisi, baik kebutuhan sehari-hari maupun peningkatan kemampuan”.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menjelaskan:

“ Beliau menjelaskan bahwa meskipun belum pernah menerima bantuan secara langsung, ia mengetahui adanya sejumlah program yang saling berkaitan dalam membantu warga miskin, seperti bantuan sembako, layanan kesehatan gratis, bantuan pendidikan, serta pelatihan usaha kecil. Menurutnya, program-program tersebut tampak saling mendukung dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Ia berharap agar pelaksanaan program dapat lebih merata dan bisa menjangkau seluruh masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan”.

- b. Siapa OPD pelaksana program yang mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“ Beliau menyampaikan bahwa pelaksana program yang mensinergikan kebijakan dan program

penanggulangan kemiskinan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Di antaranya adalah Dinas Sosial sebagai leading sector dalam pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, Dinas Kesehatan untuk layanan kesehatan gratis, Dinas Pendidikan dalam menyediakan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta Dinas Koperasi dan UMKM yang berperan dalam pengembangan usaha kecil. Menurut beliau, BAPPEDA sendiri berperan sebagai koordinator dalam merancang dan menyinergikan kebijakan antar-OPD agar program penanggulangan kemiskinan berjalan terarah, terpadu, dan tepat sasaran”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“Program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara sinergis oleh beberapa OPD, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Koperasi dan UMKM. BAPPEDA berperan sebagai koordinator yang menyatukan kebijakan antar-OPD agar program berjalan terarah dan tepat sasaran.”

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau, beliau menyampaikan:

“Setahu saya, program bantuan dan pemberdayaan masyarakat ini dijalankan oleh beberapa dinas, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Bantuan usaha juga ada dari Dinas Koperasi dan UMKM. Kalau saya dengar, semua program itu dikoordinasikan oleh BAPPEDA supaya bisa tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.”

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menyampaikan:

"Sepengetahuan saya, program bantuan biasanya dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Tapi saya pribadi belum pernah menerima bantuan apapun. Katanya, semua program itu dikoordinasikan oleh BAPPEDA, tapi mungkin belum merata ke semua warga."

c. Dimana program yang mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

" Beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan program difokuskan pada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Penentuan lokasi program dilakukan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial agar intervensi yang dilakukan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan dan mendorong penanggulangan kemiskinan secara merata dan berkelanjutan".

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menyampaikan:

"Program-program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi biasanya dilaksanakan di wilayah-wilayah yang termasuk dalam kategori desa sangat tertinggal atau wilayah dengan angka kemiskinan tinggi. Kami memprioritaskan lokasi yang aksesibilitasnya terhadap layanan

dasar masih rendah, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Penetapan lokasi ini dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar bantuan dan program yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan bisa memberikan dampak yang signifikan."

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau, beliau menyampaikan:

"Kalau menurut saya, program-program bantuan seperti sembako dan bantuan langsung tunai itu biasanya diberikan di daerah-daerah yang jauh dari kota, seperti di desa-desa yang jalannya masih susah atau belum ada fasilitas umum yang lengkap. Di kampung saya, beberapa warga yang benar-benar susah memang dapat bantuan, karena katanya datanya diambil dari data kemiskinan yang sudah ada. Tapi memang tidak semua bisa dapat, mungkin karena keterbatasan kuota atau belum terdata."

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menyampaikan:

"Setahu saya, program bantuan itu banyak diberikan di daerah-daerah yang dianggap paling membutuhkan, seperti di desa terpencil atau yang jauh dari fasilitas umum. Tapi saya sendiri belum pernah dapat bantuan, padahal kondisi saya juga sulit. Katanya karena belum masuk dalam data penerima. Jadi meskipun programnya ada, tidak semua orang miskin bisa merasakannya, apalagi

kalau belum terdata atau tempat tinggalnya tidak dianggap prioritas.”

- d. Kapan program mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“ Bahwa pelaksanaan program biasanya dimulai setelah penetapan APBD, yakni pada awal tahun anggaran berjalan. Program-program tersebut telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir dan terus dikembangkan agar semakin terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“Pelaksanaan program yang mensinergikan kebijakan dan penanggulangan kemiskinan biasanya dimulai setelah APBD disahkan, yaitu pada awal tahun anggaran. Program-program ini sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir dan terus disesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Terutama di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi, pelaksanaannya menjadi prioritas untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.”

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau, beliau menyampaikan:

“Setahu saya, program-program bantuan itu biasanya mulai diberikan di awal tahun, setelah ada pengumuman dari pemerintah desa

atau kelurahan. Sudah beberapa tahun ini saya melihat bantuan-bantuan seperti sembako, BLT, dan lainnya datang hampir di waktu yang sama setiap tahunnya. Tapi kadang juga bisa mundur, tergantung kapan dananya turun. Tapi program seperti ini sangat membantu, apalagi untuk warga yang benar-benar membutuhkan.”

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menyampaikan:

“Kalau dari yang saya tahu, program-program bantuan itu biasanya mulai disalurkan awal tahun, setelah ada pengesahan anggaran. Tapi saya pribadi belum pernah mendapatkan bantuan tersebut, jadi kurang tahu persis kapan mulainya. Informasi biasanya disampaikan lewat aparat desa, tapi saya tidak pernah dipanggil atau didata. Harapannya sih ke depan bisa lebih merata, supaya semua yang membutuhkan benar-benar bisa merasakan manfaatnya.”

- e. Mengapa program yang mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sangat penting

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“ Beliau menyampaikan bahwa program yang mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sangat penting karena mampu mencegah tumpang tindih antar program, meningkatkan efektivitas intervensi, serta memastikan bahwa seluruh elemen pembangunan bergerak ke arah yang sama. Dengan sinergi tersebut, upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara

lebih terstruktur, terarah, dan menyeluruh, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“Program yang mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sangat penting karena dengan adanya koordinasi yang baik antar instansi, maka pelaksanaan program dapat lebih tepat sasaran dan tidak saling tumpang tindih. Sinergi ini juga memungkinkan adanya pembagian peran yang jelas antara lembaga pemerintah, sehingga intervensi terhadap masyarakat miskin bisa dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, dengan sinergi, penggunaan anggaran juga menjadi lebih efisien karena difokuskan pada kebutuhan yang paling mendesak di lapangan.”

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Ibu Nila Horni selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025 beliau, beliau menyampaikan:

“Menurut saya, program yang saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri itu sangat penting, karena kami sebagai masyarakat sering bingung dengan banyaknya program bantuan yang tidak jelas. Kalau programnya saling terhubung dan bekerja sama, bantuan bisa lebih merata dan tepat sasaran. Kami juga jadi lebih mudah memahami dan mendapatkan manfaatnya. Jadi, sinergi antar program sangat membantu kami masyarakat kecil agar tidak tertinggal dan bisa ikut merasakan pembangunan.”

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menyampaikan:

“Menurut saya, penting sekali ada program yang disinergikan dengan baik, karena kadang ada warga yang benar-benar membutuhkan tapi justru tidak mendapatkan bantuan, seperti saya. Mungkin karena datanya tidak sama atau tidak diperbarui antar instansi. Kalau semua program dan kebijakan saling terhubung dan bekerja sama, saya yakin penyaluran bantuannya bisa lebih adil dan merata. Jangan sampai ada yang berlebih, sementara yang lain tidak kebagian sama sekali.”

- f. Bagaimana cara mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marlina Arifin Pada tanggal 26 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“ Beliau menyampaikan bahwa cara mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui perencanaan yang terpadu antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta koordinasi lintas sektor secara intensif. Setiap program dirancang berdasarkan data kemiskinan yang terintegrasi dan akurat, sehingga intervensi yang dilakukan oleh masing-masing instansi dapat saling melengkapi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, forum koordinasi seperti musrenbang dan rapat lintas sektor juga dimanfaatkan sebagai sarana menyamakan persepsi dan menyusun langkah strategis agar kebijakan yang dijalankan memiliki dampak yang lebih optimal bagi pengentasan kemiskinan di daerah”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rini Hastuti pada tanggal 17 Juni 2025, beliau menyampaikan:

“Beliau menjelaskan bahwa sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui kolaborasi aktif antara Dinas Sosial dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya serta lembaga pendukung. Menurut beliau, kerja sama ini sangat penting untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran”.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Ibu Nila Horni selaku Masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Juni 2025, beliau menyampaikan:

Menurut saya, penting sekali ada kerja sama antara instansi-instansi pemerintah supaya bantuan dan program untuk masyarakat miskin itu bisa lebih terasa dan tepat sasaran. Jangan sampai satu bantuan dobel, sementara yang lain malah tidak dapat. Misalnya, kalau sudah ada bantuan sembako dari Dinas Sosial, seharusnya dibarengi juga dengan pelatihan usaha atau bantuan modal dari dinas lain. Jadi masyarakat nggak hanya dibantu sesaat, tapi juga bisa mandiri ke depannya. Kami berharap juga pemerintah sering turun ke lapangan, tanya langsung ke masyarakat, supaya tahu kebutuhan sebenarnya dan bisa menyesuaikan program yang dijalankan.”

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Susilawati selaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mendapatkan bantuan.

Kalau menurut saya, supaya program pengentasan kemiskinan ini bisa berjalan baik, pemerintah harus lebih teliti dalam mendata warganya. Kadang ada yang sebenarnya mampu

malah dapat bantuan, sementara kami yang benar-benar butuh justru tidak kebagian. Saya harap ada kerja sama yang lebih baik antara perangkat desa, dinas sosial, dan pihak-pihak lain supaya data yang digunakan benar-benar sesuai kenyataan. Kalau semua instansi saling koordinasi dan programnya disesuaikan dengan kebutuhan warga, saya yakin hasilnya bisa lebih adil dan merata. Dan alangkah baiknya kalau masyarakat juga dilibatkan dalam musyawarah, supaya suara kami juga didengar.”

PEMBAHASAN

Dari pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai gambaran umum evaluasi proses Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah No 09 Tahun 2018 Tentang penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan teori yang digunakan peneliti bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini masih belum cukup baik, sehingga perlu adanya analisis yang lebih mendalam.

Program pengurangan beban pengeluaran warga miskin di Kabupaten Bengkulu Tengah telah diimplementasikan melalui berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat pra-sejahtera. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, dapat diketahui bahwa program utama yang dilaksanakan meliputi bantuan sosial seperti Program Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan jaminan kesehatan melalui PBI-JKN. Program-program tersebut dikelola secara terpadu oleh Dinas Sosial sebagai leading sector, dengan dukungan dari Dinas Kesehatan untuk layanan kesehatan gratis dan Dinas Perumahan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni. Koordinasi lintas sektor dipimpin oleh BAPPEDA guna memastikan

program berjalan tepat sasaran, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pelaksanaan program dilakukan secara berkala setiap tahun, dimulai setelah penetapan APBD dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah. Pendekatan ini dinilai sangat penting karena bersifat menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, kesehatan, dan perumahan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Dwita Agustina dan Suci Megawati (2023) yang menyatakan bahwa program bantuan pangan non-tunai efektif dalam membantu masyarakat prasejahtera memenuhi kebutuhan pangannya. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan, sebagaimana dialami oleh Ibu Susilawati yang meskipun termasuk kategori miskin namun belum menerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyempurnaan sistem pendataan dan mekanisme penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

SIMPULAN

1. Program Pengurangan Beban Pengeluaran Warga Miskin telah dilaksanakan secara menyeluruh melalui bantuan sembako, bantuan langsung tunai (BLT), bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JKN), bantuan untuk lansia dan penyandang disabilitas, serta bantuan pendidikan dan perbaikan rumah. Program ini memberikan dampak langsung dalam meringankan beban masyarakat miskin, namun masih menghadapi kendala dalam pemerataan data dan cakupan penerima.
2. Program Peningkatan Kemampuan dan Pendapatan Warga Miskin dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerja, pemberdayaan usaha mikro, dan bantuan modal usaha. Program ini tidak hanya menargetkan bantuan sementara, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Meski memberikan manfaat,

penyebaran informasi dan akses terhadap program masih perlu ditingkatkan agar lebih merata.

3. Program Pengembangan dan Keberlanjutan UMKM difokuskan pada pelatihan manajemen usaha, bantuan peralatan, akses permodalan, dan pendampingan usaha. Kegiatan ini bertujuan menciptakan ketahanan ekonomi warga miskin berbasis potensi lokal, dengan fokus pelaksanaan di wilayah yang memiliki sumber daya strategis. Hal ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan.
4. Program Pemberdayaan Warga Miskin untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai OPD. Selain bantuan langsung, pemberdayaan juga mencakup peningkatan kapasitas seperti pelatihan usaha dan dukungan ekonomi produktif. Program ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada bantuan konsumtif, tetapi juga pembangunan kualitas hidup masyarakat.
5. Program mensinergikan Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui perencanaan terpadu lintas OPD, pemanfaatan data DTKS, dan forum koordinasi seperti Musrenbang. Sinergi ini penting untuk mencegah tumpang tindih program, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memastikan intervensi pembangunan berjalan searah. Meski sudah terkoordinasi, perbaikan dalam pemerataan pelaksanaan masih dibutuhkan agar seluruh warga miskin dapat terjangkau.

Secara keseluruhan, program-program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah menunjukkan upaya komprehensif dalam menanggulangi kemiskinan. Pendekatan yang tidak hanya bersifat bantuan langsung, tetapi juga pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal, menjadi kekuatan

utama dalam strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan akurasi dan validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar program penanggulangan kemiskinan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan mengurangi keluhan terkait ketidakmerataan bantuan.
2. Diperlukan upaya lebih aktif dalam menyosialisasikan program-program yang ada kepada masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Hal ini penting agar warga miskin yang memiliki potensi dan kemauan berusaha dapat terlibat aktif dalam program pemberdayaan ekonomi.
3. Pemerintah perlu terus memperkuat koordinasi antar-OPD melalui forum-forum rutin serta sistem informasi terintegrasi, guna mencegah tumpang tindih program dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan.
4. Evaluasi berkala dan berbasis data perlu dilakukan terhadap setiap program agar perbaikannya tepat sasaran. Pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi juga penting agar program lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
5. Pemerintah daerah disarankan untuk terus mendorong program-program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan potensi lokal, inovasi usaha, dan peningkatan kapasitas SDM, sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan struktural.

Daftar Pustaka

- Ferezegia, D. V. (2018). Jurnal Sosial Humaniora Terapan Analisis Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 4(1), 1–6.
<http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jst/article/download/6/1>
- Mohamad steven alim. (2024). *ilmu politik dan kebijakan publik*. CV mega press nusantara.
- Penduduk, P., & Maret, M. (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. 50.
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan*. 24(1), 45–53.
- Putra, B. M. (2024). *kebijakan publik teori dan praktik* (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, prof. D. (2016). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R& D*. alfabeta,cv.
- Wahyu Dewi Kesuma, E. H. F. (2019). *Manajemen Strategi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Trenggalek*. *Publika*, 7(1), 1–7.
- Zamrodah, Y. (2016). *Kebijakan Politik* (Vol. 15, Issue 2).

